

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang

Kebijakan melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah atau biasa disebut dengan kebijakan otonomi daerah, memberikan kewenangan yang lebih luas kepada setiap daerah kota/kabupaten dalam mengelola rumah tangga dan penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai bentuk kemandirian yang dimaksud bagi setiap daerah kota/kabupaten penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan disertai dengan kewenangan dalam mengelola pendapatan daerah secara mandiri dan membiayai dirinya sendiri. Sumber pembiayaan tersebut diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah, bantuan pemerintah pusat, dan sumber-sumber lain yang sah.

Demi mewujudkan tujuan dalam kemandirian mengurus urusannya sendiri tersebut setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat perencanaan strategis demi melaksanakan pembangunan yang sesuai dan tepat sasaran. Namun sebagaimana yang disampaikan oleh Masduki Attamami dalam (Attamami, 2013) bahwasanya Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kota Yogyakarta 2012-2025 dinilai belum mampu menjawab permasalahan yang ada, khususnya permasalahan pariwisata. Seperti yang dikatakan oleh anggota komisi B DPRD Kota Yogyakarta Muhammad Syafii bahwa

Pemerintah Kota Yogyakarta belum dapat menyimpulkan akar masalah dari masih banyaknya keluhan yang dilontarkan wisatawan sehingga langkah yang ditempuh pemerintah belum mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Untuk itu masih perlu adanya perbaikan dan penyesuaian strategi perencanaan untuk menjawab permasalahan yang terjadi khususnya mengenai kepariwisataan.

Sebagai salah satu sektor yang paling mempengaruhi indikator peningkatan Pendapatan Asli daerah, Sektor Pariwisata Kota Yogyakarta diwajibkan membuat ide baru. Seperti yang diungkapkan oleh Haris Firdaus dalam (Firdaus, 2106) dimana selama ini Kota Yogyakarta masih mengandalkan Malioboro, Keraton, Taman Pintar, dan Kebun Binatang Gembira Loka sebagai objek wisata. Sebagaimana kita ketahui PAD pada sektor pariwisata memiliki cakupan yang cukup luas dan secara tidak langsung sangat menjanjikan. Maka dari itu Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sudyanto mengatakan Pemkot Yogyakarta seharusnya mengembangkan daya tarik wisata baru dengan mengoptimalkan potensi yang ada, yakni bangunan cagar budaya dan kegiatan kebudayaan. Sejumlah kawasan yang memiliki bangunan cagar budaya bersejarah, misalnya Kotabaru, Kotagede, dan Jeron Beteng, bisa digarap menjadi daya tarik wisata baru. Daya tarik lain yang potensial dikembangkan adalah kampung wisata. Salah satu yang cukup siap menyambut turis adalah Kampung Wisata Cokrodiningratan di Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis.

Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta tahun 2012-2016 mengemukakan strategi yang digunakan yaitu *Aggressive Strategy* yang berarti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta harus lebih proaktif dalam melaksanakan aktifitasnya guna menangkap peluang yang telah dianalisa sebelumnya. Sehingga tertuang pula didalam Peraturan Walikota Yogyakarta No. 88 Tahun 2016 tentang RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2017 mengenai kebijakan umum untuk upaya peningkatan PAD, yaitu : (1) Mengoptimalkan PAD dengan pertimbangan kondisi perekonomian, menggali potensi PAD, serta ketentuan peraturan yang ada. (2) Kebijakan penerimaan pajak sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (3) kebijakan PAD tidak boleh memberatkan dunia usaha dan masyarakat. (4) dalam menghitung perencanaan harus secara rasional dan sesuai dengan kondisi keuangan daerah. (5) Mengoptimalkan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dalam rangka peningkatan PAD.

**Tabel 1.1 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sub Sektor Pariwisata se DIY Tahun 2011-2015 (PerJuta)**

NO	DATI II	2011	2012	2013	2014	2015
1	KOTA YOGYAKARTA	56,368	76,842	94,840	116,146	116,146
2	KAB. SLEMAN	38,943	53,194	68,632	84,780	104,985
3	KAB. BANTUL	7,399	12,529	14,533	16,046	18,281
4	KAB. KULON PROGO	1,117	2,110	2,646	2,544	3,420
5	KAB. GUNUNG KIDUL	2,309	8,478	8,168	17,415	24,107
6	PEMDA DIY	17,581	17,876	17,876	23,038	51,404
	JUMLAH	106,215	153,174	188,839	188,839	266,993

Sumber :Buku Statistik Kepariwisata 2015 oleh Dinas Pariwisata DIY

Gambaran besaran PAD yang diperoleh pemerintah DIY dapat dilihat dalam tabel 1.1 terlihat jelas bahwa terjadi peningkatan jumlah PAD pada setiap tahunnya. Kota Yogyakarta menjadi kota dengan PAD tertinggi di DIY (Dinaspariwisata, 2015).

**Tabel 2.1 Jumlah PAD Sub Sektor Pariwisata DIY Tahun 2015 (perjenis Pendapatan / Pungutan) (perJuta)**

No	Sumber	Kota	Sleman	Bantul	Kulonprogo	Gunung Kidul	Pemda DIY
1	Pajak Hotel & Restaurant	106,789	91,434	6,599	1,021	3,073	TA
2	Pajak Tontonan / Hiburan	9,357	8,688	531,504	42,027	53,131	TA
3	Retribusi Objek dan Daya Tarik Wisata	TA	4,526	11,146	2,272	20,436	TA
4	Retribusi Perijinan Usaha Pariwisata	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP
5	Retribusi Penggunaan Aset Milik Pemda (sewa/kontrak/bagi hasil)		336,148	4,000	85,050	543,969	51,404
	Total	116,146	104,985	18,281	3,420	24,107	51,404

*Sumber : Buku Statistik Kepariwisata 2015 oleh Dinas Pariwisata DIY*

Jika melihat dari sumber PAD nya akan ditemukan alasan mengapa Kota Yogyakarta berhasil memperoleh PAD tertinggi di DIY. Pada tabel 1.2 jenis pendapatan PAD Kota Yogyakarta berasal dari pajak hotel & restoran serta pajak tontonan/hiburan. Jumlah pendapatan yang didapatkan cukup besar bila dibandingkan dengan kabupaten yang lainnya padahal Kota Yogyakarta tidak mendapatkan pemasukan yang berasal dari retribusi objek dan daya tarik wisata. Berbeda dengan kabupaten yang lainnya selain memperoleh pendapatan dari sumber yang sama, kabupaten lain mendapatkan pemasukan tambahan dari retribusi objek dan daya tarik wisata serta retribusi penggunaan aset milik pemda (sewa/kontrak/bagi hasil).

Dengan diperolehnya PAD tertinggi maka secara tidak langsung peran dan strategi dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dalam mewujudkan kemandirian pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan program yang direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dikarenakan pemerintah sudah mampu membiayai dirinya sendiri dalam urusan pemerintahan. Namun sebagian besar PAD yang didapatkan berasal dari pajak Hotel & restaurant, jika melihat cakupan wilayah Kota Yogyakarta sudah tidak mungkin lagi untuk mendirikan hotel maupun restaurant.

Dari data tersebutlah alasan pemilihan unit penelitian bertempat di Kota Yogyakarta khususnya pada Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, pemerintah daerah perlu membuat perencanaan ulang ataupun strategi baru agar PAD yang didapat terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, walaupun secara geografis Kota Yogyakarta sudah tidak mampu menciptakan objek wisata baru. Sehingga berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PERENCANAAN STRATEGIS DINAS PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA SEKTOR PARIWISATA TAHUN 2017”.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1.2.1 Bagaimana perencanaan strategis yang dilakukan Dinas Pariwisata dalam upaya peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sektor pariwisata Kota Yogyakarta?

1.2.2 Faktor apakah yang mendukung dan menghambat perencanaan strategis Dinas Pariwisata dalam upaya Peningkatan PAD sektor pariwisata?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Untuk mengetahui dan mengkaji perencanaan strategis Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dalam upaya peningkatan PAD pada sektor pariwisata.

1.3.2 Untuk mengetahui dan mengkaji faktor yang mendukung dan menghambat perencanaan strategis Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dalam upaya peningkatan PAD pada sektor pariwisata.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam bidang keilmuan pembuatan perencanaan strategis.

## **1.4.2 Manfaat Praktis**

### 1.4.2.1 Bagi Pemerintah

- a. Hasil penelian ini bermanfaat sebagai sumber referensi berjalannya sebuah peraturan daerah yang apabila sudah tidak relefan lagi butuh perbaikan segera.
- b. Hasil penelian ini bermanfaat untuk menjadi bahan evaluasi kinerja dari dinas yang terkait dalam proses perencanaan strategis.

### 1.4.2.2 Bagi peneliti

- a. Menerapkan teori-teori yang telah diterima semasa menjalani perkuliahan.
- b. Menambah pengalaman dan pengetahuan selama melakukan penelitian.

## 1.5 Kajian Teori

Berdasarkan dengan pemahaman tersebut maka kajian teori yang sesuai dengan Perencanaan Strategis Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dalam upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata Tahun 2017 akan dijelaskan dalam hal-hal sebagai berikut :

### **1.5.1 Perencanaan Strategis**

Michael E. Porter (dalam Usmara, 2006), mengemukakan arti dari Strategi adalah menciptakan suatu penyesuaian diantara aktivitas-aktivitas

yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Dengan memperhatikan keberhasilan suatu strategi tergantung pada melakukan banyak hal dengan baik, tidak memilih pekerjaan tersebut dan mengintegrasikannya. Jika dalam mengupayakan strategi tersebut tidak ada penyesuaian, maka tidak akan ada strategi khusus dan tidak ada sedikitpun keselarasan pekerjaan.

Henry Mintzberg (dalam Usmara, 2006) berpendapat, Strategi adalah sebuah rencana atau tuntunan yang jelas untuk tindakan dimasa yang akan datang. Kemudian Henry juga memberikan pengertian lain dari Strategi yaitu salah satu kata yang didefinisikan dalam satu cara atau yang lainnya tanpa menyadari perbedaan.

Pemerintah daerah sebagai organisasi publik juga harus memiliki perencanaan strategi yang merupakan sebuah pendekatan secara teratur dan pragmatis yang dapat digunakan dalam pembuatan keputusan saat ini dan untuk masa yang akan datang. Perencanaan strategi ini adalah proses pengkajian diri, penetapan tujuan, pengembangan strategi, dan monitor kinerja (Hamali, 2016)

Setiap organisasi memiliki strategi, dalam hal ini untuk mewujudkan tujuan-tujuan organisasi yang harus dimiliki suatu organisasi adalah rencana kegiatan. Strategi organisasi tampak pada pola-pola tujuan, kebijakan, program-programnya, kegiatan, keputusan dan pengalokasian sumberdayanya. Suatu strategi yang efektif harus memenuhi beberapa kriteria yaitu :

- 1) Strategi secara teknis harus dapat dijalankan



- 2) Strategi secara politis dapat diterima oleh para *key stakeholders*
- 3) Strategi harus sesuai dengan filosofi dan nilai-nilai organisasi
- 4) Strategi harus sesuai dengan isu strategis yang hendak dipecahkan

#### 1.5.1.1 Proses Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis oleh John. M. Bryson didefinisikan sebagai upaya yang dimaksudkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan mengarahkan suatu organisasi secara efektif merespon lingkungan yang telah berubah secara dramatis. Perumusan strategi merupakan garis besar dari tantangan-tantangan mendasar yang dihadapi. Oleh karena itu strategi harus dirumuskan selaras dengan isu strategis yang telah diidentifikasi (M.Bryson, 2005).

- a) Mengidentifikasi alternatif-alternatif umum yang dapat digunakan untuk menjawab isu-isu strategis.
- b) Mempelajari kendala-kendala yang kemungkinan muncul dalam pelaksanaan pelaksanaan alternatif –alternatif umum tersebut.
- c) Merumuskan usulan-usulan utama yang dapat digunakan untuk mewujudkan alternatif-alternatif tersebut, sekaligus mengantisipasi kemungkinan adanya kendala.
- d) Merumuskan kegiatan utama apa yang harus dilakukan dalam satu atau dua tahun kedepan.

- e) Merumuskan langkah-langkah khusus yang harus dilakukan dalam enam bulan kedepan dan menetapkan siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya.

Pengertian perencanaan strategis menurut Berry dan Wechsler (dalam Asmoko, 2011) merupakan suatu proses sistematis untuk mengelola organisasi dan arah mendatang dalam hubungan dengan lingkungan dan permintaan pemangku kepentingan eksternal, mencakup perumusan strategi, analisis kekuatan dan kelemahan agensi, identifikasi pemangku kepentingan agensi, implementasi tindakan strategis, dan manajemen isu.

Menurut Gaspersz (dalam Asmoko, 2011) menjelaskan manfaat perencanaan strategis, diantaranya adalah :

- a. Berguna bagi perencanaan untuk perubahan dalam lingkungan dinamika yang kompleks,
- b. Berguna untuk pengelolaan hasil,
- c. Perencanaan strategis merupakan suatu alat manajerial yang penting,
- d. Perencanaan strategis berorientasi pada masa depan,
- e. Perencanaan strategis mampu beradaptasi,
- f. Perencanaan strategis adalah penting untuk mendukung pelanggan,
- g. Perencanaan strategis mempromosikan komunikasi.

Ada delapan langkah dalam proses perencanaan strategis. Langkah tersebut harus mengarahkan pada tindakan, hasil dan penelitian evaluasi, atau implementasi dan evaluasi tidak harus menunggu hingga akhir, tetapi

harus menjadi bagian yang menyatu dengan proses dan terus-menerus.

Langkah-langkah tersebut menurut Bryson (M.Bryson, 2005):

1. Memrakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis
2. Mengidentifikasi mandat organisasi
3. Memperjelas misi dan nilai organisasi
4. Analisis lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan Analisis lingkungan eksternal (peluang dan tantangan)
5. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi
6. Merumuskan strategi untuk mengelola isu
7. Menetapkan visi organisasi yang efektif untuk masa depan

Selain melakukan pendekatan dengan istilah perencanaan strategi, dalam suatu konsep pendekatan juga harus memahami mengenai manajemen strategi. Manajemen strategi itu sendiri bertujuan untuk menciptakan langkah-langkah efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Dengan poin pentingnya suatu organisasi harus membuat strategi dengan berdasarkan kepada efektifitas, efisiensi dan manajemen organisasi (Sabariah, 2016).

Prinsip perencanaan pembangunan daerah harus meliputi satu kesatuan dalam sistem pembangunan nasional, dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya masing-masing, dapat mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dengan

dinamika perkembangan daerah dan nasional. Sehingga diaturlah dalam sebuah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk priode lima tahun. Dalam renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan. SKPD bertugas menyusun Renstra SKPD, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Tahapan penyusunan renstra SKPD ini adalah :

- a) Persiapan penyusunan renstra SKPD
- b) penyusunan rancangan renstra SKPD
- c) penyusunan rancangan akhir renstra SKPD
- d) penetapan renstra SKPD

Dalam perumusan rancangan Renstra SKPD ada beberapa hal yang dibutuhkan, cakupan wilayah kabupaten/kota, yaitu :

- a) pengelolaan data dan informasi
- b) analisis gambaran pelayanan SKPD kabupaten/kota
- c) review renstra kementerian/lembaga dan renstra SKPD provinsi
- d) penelaahan RTRW kabupaten/kota
- e) analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota

- f) perumusan isu-isu strategis
- g) perumusan visi dan misi SKPD kabupaten/kota
- h) perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD kabupaten/kota
- i) perumusan sasaran pelayan jangka menengah SKPD kabupaten/kota,
- j) mempelajari surat edaran Bupati/Walikota perihal penyusunan rancangan renstra SKPD kabupaten/kota beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten/kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD kabupaten/kota,
- k) perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD kabupaten/kota, guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota,
- l) perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan,
- m) perumusan indikator kinerja SKPD kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota,
- n) pelaksanaan forum SKPD kabupaten/kota.

Pelaksanaan perumusan rancangan renstra SKPD merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD. Setelah perumusan selesai kemudian dilakukan penyajian rancangan renstra SKPD dengan sistematika sebagai berikut :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan SKPD;

- c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
- d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
- e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
- f. indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Dalam dokumen Renstra SKPD dapat diketahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjawab berbagai macam persoalan yang terjadi di daerahnya agar mendapatkan penanganan yang tepat, akurat, efektif dan efisien.

#### 1.5.1.2 Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman (*Strenght, Weakness, Oppourtunity, and Threat*). Analisis ini merupakan identifikasi masalah yang bersifat sistematis dari faktor kekuatan dan kelemahan suatu organisasi serta mengidentifikasi peluang dan ancaman lingkungan luar. Sebuah strategi yang menyajikan kombinasi terbaik diantara keempatnya. Dari hasil analisis ini organisasi dapat menentukan strategi yang akan dilakukan setelah mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, yaitu dengan memanfaatkan kekuatan yang dimilikinya untuk mengambil keuntungan dari peluang-peluang yang ada, sekaligus memperkecil atau mengatasi kelemahan yang dimilikinya untuk menghindari ancaman yang ada. Berikut akan disajikan tabel berupa

komponen-komponen yang digunakan dalam analisis SWOT berdasarkan unsur-unsurnya (Hamali, 2016)

**Tabel 3.1 Komponen Analisis SWOT**

Unsur	Komponen
Internal	Kekuatan ( <i>Strength</i> ) Kondisi dimana kekuatan berasal dari organisasi atau program yang dijalankan.
	Kelemahan ( <i>Weakness</i> ) Sebuah kondisi dimana kelemahan berasal dari organisasi atau program yang dijalankan.
Eksternal	Peluang ( <i>Opportunity</i> ) Suatu kondisi yang berasal dari luar dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi masa depan.
	Ancaman ( <i>Threat</i> ) Situasi bagi organisasi yang datang dari luar dan dapat mengancam eksistensi organisasi pada masa depan.

### 1.5.2 Pendapatan Asli Daerah

Faktor utama yang mendukung terlaksanannya otonomi daerah salah satu diantaranya adalah PAD. Dimana PAD merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mendukung kemampuan keuangan daerah secara mandiri. Kemampuan keuangan yang bersumber dari PAD dijadikan salah satu variable untuk mengukur kemampuan daerah guna melaksanakan tugas otonomi yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sehingga agar pemerintah daerah dapat menjalankan urusan rumah tangganya sendiri, maka pemerintah daerah perlu meningkatkan pendapatan daerahnya melalui pemberdayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak, retribusi, dan lain-lain (Nugroho, 2000).

Dalam undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli

Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PAD menurut (Halim, 2004) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah tersebut yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah tersebut atau yang berlaku secara umum di seluruh Indonesia. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Dengan demikian pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah dari berbagai macam pungutan atas potensi yang ada di daerah tersebut.

#### 1.5.2.1 Sumber Pendapatan Asli Daerah

PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 285, yaitu :

##### a. Hasil pajak daerah

Hasil pajak daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan



pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.

b. Hasil retribusi daerah

Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budget nya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah,

memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD yang sah menurut undang-undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah bersumber dari :

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- 2) Jasa giro;
- 3) Pendapatan bunga;
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 5) Komisi, potongan, maupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh daerah.

PAD diharapkan menjadi salah satu sumber APBD yang paling dominan karena kemampuan suatu daerah dalam membiayai urusan rumah tangganya dapat dilihat dari besar kecilnya PAD yang didapatkan. Tanpa adanya sumber keuangan ini, maka pemerintah daerah akan sangat kesulitan dalam melaksanakan pelayanan dan pembangunan bagi masyarakat secara efektif dan efisien terlebih lagi demi tercapainya tujuan-tujuan pembangunan daerah. PAD yang

didapatkan masing-masing daerah pastilah berbeda sesuai dengan potensi yang dimiliki sehingga mempengaruhi keuangan daerah.

### **1.5.3 Sektor Pariwisata**

Menurut UU No.9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan, yang dimaksud kepariwisataan adalah sebagai berikut :

- 1) Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek atau daya tarik wisata.
- 2) Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
- 3) Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut.
- 4) Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
- 5) Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa.

Ada beberapa jenis pariwisata yang terdapat di daerah tujuan wisata yang menarik *customer* untuk mengunjunginya sehingga dapat pula diketahui jenis pariwisata yang mungkin layak untuk dikembangkan dan mengembangkan jenis sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata tersebut (Badrudin, 2001).

1. Pariwisata untuk menikmati perjalanan (*pleasure tourism*)

Pariwisata ini dilakukan oleh orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, mencari udara segar, merelaksasikan ketegangan syaraf, untuk menikmati keindahan alam, untuk menikmati hikayat rakyat suatu daerah, untuk menikmati hiburan dan sebagainya.

2. Pariwisata untuk rekreasi (*recreation sites*)

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh seseorang yang menghendaki pemanfaatan hari-hari libur untuk istirahat, untuk memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohani, yang akan menyegarkan keletihan dan kelelahan.

3. Pariwisata untuk kebudayaan (*cultural tourism*)

Pariwisata ini ditandai dengan adanya rangkaian motivasi seperti keinginan untuk belajar di pusat-pusat pengajaran dan riset, untuk mempelajari adat istiadat, cara hidup masyarakat negara lain dan sebagainya.

4. Pariwisata untuk olahraga (*sport tourism*)

Pariwisata yang bertujuan untuk tujuan olahraga, baik untuk hanya menarik penonton olahraga dan olahragawannya sendiri serta ditujukan bagi mereka yang ingin mempraktekkannya sendiri.

5. Pariwisata untuk urusan dagang besar (*business tourism*)

Dalam pariwisata ini, unsur yang ditekankan adalah kesempatan yang digunakan oleh pelaku perjalanan ini yang menggunakan waktu-waktu bebasnya untuk menikmati dirinya sebagai wisatawan yang mengunjungi berbagai objek wisata dan jenis pariwisata lain.

#### 6. Pariwisata untuk konvensi (*convention tourism*)

Wisatawan yang melakukan perjalanan wisata dengan macam-macam motivasi.

Pada saat melakukan perjalanan wisata, seorang wisatawan memerlukan berbagai macam jasa dan produk wisata yang dibutuhkannya. Jasa dan produk wisata inilah yang disebut dengan komponen pariwisata. Komponen pariwisata ini dapat disediakan oleh pihak pengusaha, masyarakat, atau siapapun yang berminat untuk menyediakan jasa pariwisata. Komponen pariwisata tersebut meliputi (Sari, 2011) :

1. Objek dan daya tarik wisata
2. Akomodasi
3. Angkutan wisata
4. Sarana dan fasilitas wisata
5. Prasarana wisata

#### 1.6 Definisi Konseptual

Teori yang terkait perencanaan strategis dan sesuai dengan judul Penelitian ini Perencanaan Strategis Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata yaitu yang dikemukakan oleh John M. Bryson (2005), perencanaan strategis adalah proses manajerial untuk mengembangkan dan menjaga agar tujuan, keahlian dan sumber daya organisasi sesuai dengan kondisi lingkungan yang terus menerus berubah. Tujuan perencanaan strategis adalah untuk

membentuk serta menyempurnakan organisasi sehingga memenuhi target kinerja yang diharapkan, sehingga dalam proses perencanaan harus ada yang memrakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis, adanya identifikasi mandat organisasi, memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi, melakukan penilaian lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) dan penilaian internal (kekuatan dan kelemahan), mengidentifikasi isu strategis yang sedang dihadapi kemudian menentukan strategi untuk mengelola isu, serta menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan.

Penulis akan membatasi fokus penelitian yaitu perencanaan yang dimaksud lebih terfokus kepada perencanaan yang telah terlulis dalam dokumen rencana strategis SKPD Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Terlebih lagi terhadap rencana atau cara yang akan dilakukan untuk meningkatkan PAD pada sektor pariwisata dengan menambahkan faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dilakukannya proses perencanaan strategis.

## 1.7 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu hal yang dibutuhkan peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam hal ini mengenai Perencanaan Strategis yang dibuat oleh Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta untuk memaksimalkan PAD Sektor Pariwisata yaitu,

### 1. Proses Perencanaan Strategis

- a. memrakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis,
  - Melibatkan kelompok/unit atau organisasi dalam upaya memrakarsai dan menyepakati proses perencanaan strategis,
- b. mengidentifikasi mandat organisasi,
  - mandat formal dan informal yang ditetapkan organisasi.
- c. memperjelas misi dan nilai organisasi,
  - Memperjelas tujuan organisasi.
- d. identifikasi lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) dan identifikasi lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan),
  - peluang dan ancaman dipantau dari berbagai kecenderungan politik, ekonomi, sosial dan teknologi.
  - kekuatan dan kelemahan dapat dipantau dari sumber daya, strategi sekarang, dan kinerja yang dilakukan.
- e. mengidentifikasi isu strategis yang sedang dihadapi,
  - penyajian isu disajikan dengan ringkas mencakup konflik dengan landasan menyangkut tujuan (apa), cara (bagaimana), filsafat (mengapa), tempat (dimana), waktu (kapan) dan kelompok mana yang akan diuntungkan dengan konflik (siapa).
- f. melakukan perumusan strategi untuk mengelola isu-isu,
  - identifikasi program,
    - ✓ Penetapan tujuan program,
    - ✓ Penetapan sasaran (indikator),

- ✓ Penentuan program dan kegiatan,
  - ✓ Identifikasi *outcome* dan *output*,
  - ✓ Penetapan kebijakan.
- g. Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan,
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Perencanaan Strategis

## 1.8 Metode Penelitian

### 1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif menurut Catherine Marshal (dalam Sarwono, 2006) kualitatif riset didefinisikan sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari adanya interaksi antar manusia. Dalam penelitian kualitatif peneliti lebih terfokus pada proses dari pada hasil akhir. Desain penelitian kualitatif pun bersifat fleksibel dan dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi lapangan (Sarwono, 2006)

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang/jasa. Hal terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian/fenomena/gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori. Jangan sampai suatu yang berharga tersebut berlaku bersama waktu tanpa meninggalkan manfaat. Penelitian kualitatif dapat didesain unuk memberikan sumbangannya terhadap teori, praktik, kebijakan, masalah-masalah sosial dan tindakan (Komariah, 2012).

Pada akhirnya penelitian ini berkisar pada pengumpulan data yang kemudian disusun, diolah, ditafsirkan dan kemudian dari data tersebutlah



diolah kembali dan diberi makna rasional dengan mematuhi prinsip-prinsip logika untuk memperoleh kesimpulan yang akurat dan kritis.

### 1.8.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kota Yogyakarta lebih tepatnya pada Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.

### 1.8.3 Teknik pengumpulan data

#### 1.8.3.1 Data Primer

##### a. Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data secara langsung yang diperoleh dari informan sebagai sumber data. Instrumen bantuan yang digunakan dalam melakukan wawancara yang lazim digunakan yaitu panduan atau pedoman wawancara dan alat perekam (Prof. Dr. Afrizal, 2016).

**Tabel 4.1 Data Primer**

No	Bentuk data	Teknik pengumpulan data	Sumber Data
1	Teks wawancara, Rekaman wawancara	Wawancara	Informan: a. Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta b. Sub Bidang sekretariat, c. Sub Bidang Perencanaan, evaluasi dan pelaporan, d. Bidang Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata. e. Bidang Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata, f. Bidang Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

### 1.8.3.2 Data Sekunder

Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Data ini biasanya berasal data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah literatur berupa penelitian dan juga data-data yang berkaitan dengan penyusunan rencana strategi SKPD, dan data-data lain yang dibutuhkan.

#### a. Kajian Dokumen

Melalui teknik ini mempelajari berbagai sumber data melalui laporan hasil penelitian, catatan, buku, agenda, surat kabar dan majalah. Tujuannya adalah untuk mencari kebenaran ilmiah secara umum sebagai landasan berpijak dalam menganalisa data dan menjawab permasalahan yang diajukan.

**Tabel 5.1 Data Sekunder**

No	Nama Data	Sumber Data
1	Surat Edaran Walikota	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta
2	Renstra SKPD 2012-2016 dan 2017-2021	
3	Renja SKPD 2017	

### 1.8.4 Teknik Analisa Data

Teknik analisis kualitatif menurut (Sarwono, 2006) ialah analisis yang didasarkan pada adanya hubungan semantis antara variabel yang sedang diteliti sehingga prinsip pokok teknik analisa data adalah mengolah

dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

Menurut Bogdan dan Biklen, Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap yang ditemukan (Husain Usman dan S.A, 2008).

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah peneliti berusaha mencari informasi mengenai data-data yang berkaitan dengan tema penelitian yang akan dijadikan acuan dasar dalam menganalisa permasalahan. Data-data berasal dari catatan lapangan hasil dari wawancara, observasi dan kajian dokumen.

b. Display Data

Display data adalah menyajikan data dalam bentuk matriks, *network*, *chart* atau grafik, dan sebagainya. Dengan demikian, peneliti dapat menguasai data dan tidak terbenam dengan setumpuk data.

c. Pengambilan Keputusan dan Verifikasi

Peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperolehnya. Ia berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis, dan sebagainya. Jadi, dari data yang didapatnya itu, ia mencoba mengambil kesimpulan. Mula-mula kesimpulan itu kabur, tetapi lama-kelamaan semakin jelas karena data

yang diperoleh semakin banyak dan mendukung. Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat, yaitu dengan cara mengumpulkan data baru.